

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM MENGGUNAKAN
INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA *E-GOVERNMENT***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh :

**YENNI PUSPITA SARI
NIM. 07011281924103**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MEI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM MENGGUNAKAN
INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA *E-GOVERNMENT***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

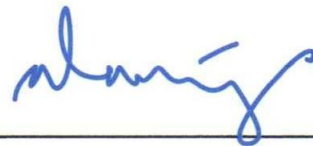
Oleh :

**YENNI PUSPITA SARI
NIM. 07011281924103**

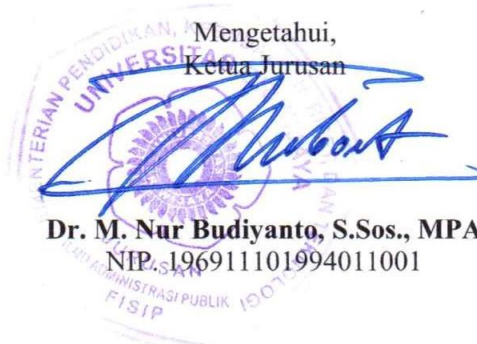
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing,

**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

UNIVERSITAS
FISIP

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
MENGUNAKAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA *E-GOVERNMENT***

Skripsi

Oleh :

Yenni Puspita Sari

07011281924103

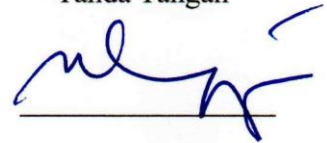
**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Mei 2023**

Pembimbing :

Dr. Alamsyah, S.IP, M.Si

NIP. 197808182009121002

Tanda Tangan

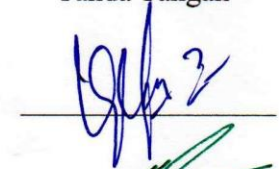


Penguji :

Dr. Nengyanti, M.Hum

NIP. 196704121992032002

Tanda Tangan



Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yenni Puspita sari
NIM : 07011281924103
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menggunakan Instagram Sebagai Media *E-government*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, Mei 2023



Yenni Puspita Sari

NIM. 07011281924103

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, atas Ridha Allah SWT. Skripsi ini ku persembahkan kepada : ayah (Alm), ibu, ayuk dan adik-adikku, dosen pembimbingku, sahabat seperjuanganku, seluruh dosen dan pegawai FISIP Unsri, dan almamater kebanggaanku

ABSTRAK

Electronic government adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Atas tuntutan perubahan paradigma pelayanan publik tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mulai menggunakan Instagram sebagai wadah pelayanan publik untuk memberikan informasi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi DPPPA dalam penggunaan Instagram sebagai media *e-government*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan Instagram sebagai media *e-government*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum cukup siap untuk menggunakan Instagram, hal ini dikarenakan kurangnya infrastruktur pembuatan konten dan kurangnya kemampuan SDM sehingga mengandalkan jasa pihak ke-3. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Instagram di DPPPA masih memiliki kelemahan di semua elemen kesiapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu elemen *support*, *capacity*, dan *value*. Saran yang dapat diberikan terkait permasalahan dalam penelitian ini ialah DPPPA dapat melakukan pemeliharaan isi konten Instagram secara mandiri dengan diadakannya atau diikutinya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan *skill* tim pengelola dan mengajukan anggaran pengadaan alat infrastruktur yang masih kurang.

Kata kunci : Kesiapan, *e-government*, media sosial, Instagram

Pembimbing,


Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

Indralaya, Mei 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Electronic government is an effort to administer government based on electronics in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. Responding to the demand for a change in the paradigm of public service, the South Sumatra Provincial Office of Women's Empowerment and Child Protection began using Instagram as a forum for public services to provide information. However, in practice there are obstacles faced by DPPPA in using Instagram as an e-government media. The purpose of this research is to find out how the South Sumatra Provincial DPPPA is prepared to use Instagram as an e-government media. The type of research used is qualitative research. The results of this study indicate that the South Sumatra Province Women's Empowerment and Child Protection Service is not yet sufficiently prepared to use Instagram, this is due to a lack of infrastructure for content creation and a lack of human resource capabilities so that it relies on third party services. From the results of this study it can be concluded that the use of Instagram in DPPPA still has weaknesses in all elements of readiness used in this study, namely elements of support, capacity, and value. Suggestions that can be given regarding the problems in this study are that DPPPA can carry out maintenance of Instagram content independently by holding or participating in training that can improve the skills of the management team and submit costs for procuring infrastructure equipment that is still lacking

Keywords : Readiness, e-government, social media, Instagram

Advisor,


Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009111002

Indralaya, Mei 2023

***Chairman of Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University***


Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T, berkat rahmat dan Hidayah-Nya peneliti senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Analisis Kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menggunakan Instagram Sebagai Media *E-government*”. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, serta doa-doa dari berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Andy (Alm) dan Ibunda Agustina, serta saudari tertua saya Dina dan Dini dan adik-adik saya Wulan, Lila, Satria, dan Eci tersayang yang selalu memberikan semangat, doa, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membantu memberikan berbagai saran dan masukan selama proses penulisan
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya beserta Admin dan Staf FISIP Unsri
8. Ibu Henny Yulianti, S.IP., M.M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pegawai dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

9. Sahabat Nadia Rahmawati dan Nabila yang telah menemani, menyemangati, memotivasi, dan bertukar pikir dalam proses penulisan skripsi
10. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2019

Peneliti ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan. Semoga dibuatnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca dan dapat menjadi salah satu sumbangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2023

Yenni Puspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAANN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	8
1.3.1 Manfaat Teoritis	9
1.3.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kesiapan	10
2.1.2 Media Sosial	14
2.1.3 Instagram	19
2.1.4 <i>E-government</i>	24
2.1.5 Peraturan Perundang-Undang Yang Berkaitan dengan Penggunaan Media Sosial di Instansi Pemerintah	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	42

3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Definisi Konsep	42
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Informan Penelitian	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	48
3.8 Sistematika Penulisan	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Sejarah DPPPA Provinsi Sumatera Selatan.....	52
4.1.2 Visi Misi DPPPA Provinsi Sumatera Selatan.....	53
4.1.3 Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Selatan	55
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	56
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	57
4.3.1 <i>Suppoet</i>	57
4.3.2 <i>Capacity</i>	66
4.3.3 <i>Value</i>	78
4.4 Diskusi.....	84
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial Indonesia.....	3
Gambar 2 Platform Sosmed Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia	4
Gambar 3 Tampilan Laman Instagram DPPPA Prov Sumsel.....	6
Gambar 4 Kegiatan Pembuatan Konten Edukasi	7
Gambar 5 Logo Instagram	21
Gambar 6 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 7 Komponen Analisis Data	50
Gambar 8 Struktur DPPPA Prov Sumsel.....	55
Gambar 9 Hasil Pengolahan Data Indikator Adanya Aturan Yang Mendukung Penerapan <i>E-government</i> di Instansi Pemerintah.....	59
Gambar 10 Ruang Informasi DPPPA	62
Gambar 11 Hasil Pengolahan Data Indikator Adanya Komitmen Pimpinan untuk Mendukung Penerapan <i>E-government</i>	63
Gambar 12 Hasil Pengolahan Data Indikator Dibuatnya Suprastruktur Pendukung .	65
Gambar 13 Hasil Pengolahan Data Indikator Sumber Daya Finansial	67
Gambar 14 Hasil Pengolahan Data Indikator Infrastruktur Teknologi.....	69
Gambar 15 Hasil Pengolahan Data Sub-indikator Ketersediaan Pegawai.....	71
Gambar 16 Pertemuan Tim Media DPPPA dan Pihak ke-3	76
Gambar 17 Hasil Pengolahan Data Sub-indikator Kemampuan SDM	77
Gambar 18 Hasil Pengolahan Data Indikator Manfaat	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian terdahulu	34
Tabel 2 Fokus Penelitian.....	44
Tabel 3 Informan Penelitian.....	47
Tabel 4 Deskripsi Informan Penelitian	56
Tabel 5 Ringkasan Hasil Penelitian	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	96
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	98
Lampiran 3 SK Skripsi.....	100
Lampiran 4 Surat Tugas Skripsi.....	102
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi	103
Lampiran 6 Kartu Revisi Sempro	104
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	105
Lampiran 8 Surat Balasan Izin Penelitian.....	106
Lampiran 9 Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial DPPPA	107
Lampiran 10 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	110

DAFTAR SINGKATAN

DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<i>E-government</i>	: Elektronik <i>government</i>
FAQ	: <i>Frequently Asked Question</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
Instagram	: Instan dan Telegram
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
Medsos	: Media Sosial
Perda	: Peraturan Daerah
Prov	: Provinsi
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SK	: Surat Keputusan
Sumsel	: Sumatera Selatan
TIK	: Teknologi Informasi dan KomunikasI
UGC	: <i>User Generated Content</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda yang memuat 17 landasan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghadapi berbagai macam tantangan *global* yang terjadi dan mulai berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2030, SDGs merupakan lanjutan dan gabungan dari kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2000-2015. Usaha dalam mengatasi hambatan pelaksanaan SDGs membutuhkan perubahan yang lebih kompleks dari segi masyarakat, inovasi, dan teknologi yang digunakan pemerintah agar memungkinkan keterlibatan lebih banyak aktor dalam proses diskusi penyelesaian masalah (Yamin, 2018).

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan negara merupakan salah satu agenda dari SDGs. Mengamati hal tersebut, pelaksanaan *e-government* kemungkinan besar berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan pemerintah. Pemerintahan yang bersifat *open government* merupakan salah satu perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penguatan institusi yang tercantum pada poin ke 16 di agenda SDGs. Pada poin tersebut dijabarkan lagi *goals/target* yang ingin dicapai diantaranya yaitu pada poin 16.6 “membangun institusi-institusi yang transparan dan akuntabel di semua level” dan poin 16.7 yaitu “memastikan pengambilan keputusan yang partisipatif, inklusif, responsif, dan representatif di semua level”. *Goals* tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan *e-government*.

Penggunaan internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan masyarakat saat ini. Kehadiran internet dan TIK telah memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, bertransaksi, hingga mengakses layanan publik. Kemudahan yang dibawa atas penggunaan TIK mulai membuat masyarakat menginginkan segala sesuatunya selesai dengan cepat dan *realtime*. Perkembangan TIK yang semakin pesat juga membawa perubahan besar dalam pola pemberian informasi dan interaksi antar pemerintah dan masyarakat, perkembangan tersebut mampu mengubah tatanan pemberian informasi yang sebelumnya mengandalkan interaksi tatap muka maupun melalui media massa (konvensional) bergeser ke arah penggunaan internet untuk berbagi informasi secara cepat dan efektif tanpa adanya pembatasan waktu, jarak, maupun tempat.

Pemanfaatan TIK dalam proses kerja pemerintah Indonesia didukung dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, disebutkan dalam Inpres tersebut bahwa pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, sebagaimana pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan transparan kepada publik, untuk itu pemerintah di berbagai tingkatan mulai mencari sarana komunikasi dan interaksi yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi kolaborasi maupun partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah. Penggunaan media sosial menawarkan kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah dijangkau, dan interaktif. Karena hal

itulah, medsos kemudian mulai banyak digunakan instansi pemerintah sebagai saluran interaksinya dengan publik (Bertot *et al* dalam Hastrida, 2021).

“*Today, everything is about Social Media*” Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kaplan & Haenlein (2010) yang merujuk pada anggapan dimana penggunaan medsos dapat melibatkan interaksi langsung antar organisasi dan masyarakat dengan pengeluaran yang relatif rendah namun dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan media konvensional. Media sosial dapat dikatakan sebagai *platform* yang penting untuk dimanfaatkan tidak hanya bagi perusahaan swasta multinasional, tetapi juga untuk lembaga *non-profit* dan pemerintah (Kaplan & Haenlein, 2010). Penggunaan medsos dianggap efektif untuk menjangkau khalayak luas mengingat bahwa setiap tahunnya pengguna medsos terus meningkat secara signifikan. Berikut data jumlah pengguna aktif medsos di Indonesia tahun 2022 :

Gambar 1 Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia



Sumber : DataIndonesia.id

Menurut laporan We are social & Hootsuite (2022) jumlah pengguna medsos di Indonesia setara dengan 68,9% dari total populasi pada awal tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Instagram adalah salah satu *platform* medsos yang eksis dipakai saat ini, *platform* media tersebut memberikan kebebasan pada penggunanya untuk membagikan foto maupun video dalam konteks yang beragam. Instagram sendiri berada di urutan ke-2 setelah *whatsapp* sebagai medsos yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia per-Januari 2022 dengan waktu rata-rata yang dihabiskan untuk penggunaan medsos selama 197 menit atau sekitar 3,2 jam per hari (Databoks, 2022). Kebiasaan mengakses medsos tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menyediakan akses perolehan informasi dan edukasi melalui perantara media sosial Instagram.

Gambar 2 Platform Sosmed Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia



Sumber : Goodstats

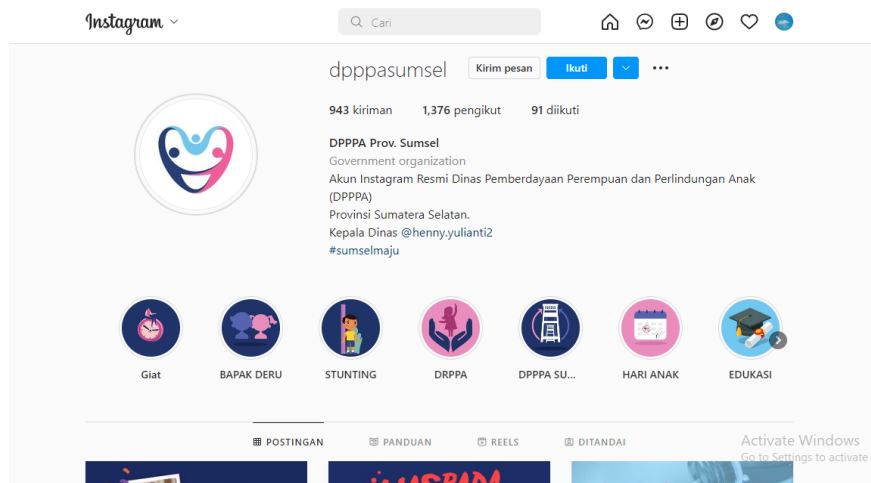
Pada keadaan sebenarnya, pemanfaatan medsos dalam ranah sektor publik di Indonesia seringkali ditemui berbagai hambatan hingga berakhir gagal untuk menciptakan pelayanan publik yang signifikan (Sudarsono & Lestari, 2018). Kendala-kendala yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada (Aprilia, 2020). Hal ini senada dengan beberapa hasil temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damanik & Purwaningsih (2018), Randang et al (2020) dan Tamma & Utomo (2021) yang sama-sama menemukan bahwa ketidak-optimalan pemanfaatan TIK di sektor publik dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan SDM aparatur pemerintah, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran pengelolaan *e-government*, dan belum kuatnya komitmen pimpinan untuk menjalankan media *e-government* terkait.

Apabila menilik *e-government* di negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan, media sosial sudah mampu menjadi sarana pelayanan dan partisipasi publik sehingga umpan balik yang diterima dari masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan dan sebagai masukan-masukan atas solusi penanganan krisis yang mungkin terjadi di negaranya (Lavenia, 2021). Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, pengelolaan medsos yang masih terkendala pada kurangnya kesiapan instansi mengakibatkan budaya kerja aparatur masih berorientasi pada aspek performatif (membangun citra publik) dibandingkan aspek normative (memberikan informasi, mencari *feedback*, dan berdialog dengan publik) (Arianto, 2022), instansi publik cenderung hadir di medsos hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensinya kepada publik. Oleh sebab itu, penggunaan medsos di sektor publik hendaklah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena kesiapan

memegang peran penting agar keberhasilan pelaksanaan *e-government* dapat terwujud.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi publik yang telah menggunakan Instagram untuk mendukung pelaksanaan *e-government* instansinya. Instagram resmi DPPPA sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2018 tetapi untuk penggunaan aktif baru dilakukan pada pertengahan tahun 2021. DPPPA memanfaatkan Instagram sebagai wadah dalam pemberian informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Instagram DPPPA Prov Sumsel dapat diakses dengan *username* @dpppasumsel

Gambar 3 Tampilan Laman Instagram DPPPA Prov Sumsel



Sumber : [instagram.com/dpppasumsel/](https://www.instagram.com/dpppasumsel/)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terdapat temuan masalah dalam penggunaan Instagram di DPPPA, adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan pegawai yang sering merasa kesulitan ketika hendak membuat konten informasi khususnya konten edukasi berbentuk video. Kesulitan tersebut disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur teknologi untuk mendukung pembuatan konten informasi di DPPPA.

Gambar 4 Kegiatan Pembuatan Konten Edukasi



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar diatas merupakan kegiatan pembuatan konten edukasi yang membahas tentang forum anak. Dari gambar tersebut dapat terlihat adanya peralatan-peralatan pembuatan konten. Namun, diketahui bahwa peralatan tersebut merupakan kepunyaan pribadi salah satu pegawai. Peneliti melihat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan pembuatan konten tersebut pegawai yang memiliki peralatan mesti pulang terlebih dahulu untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan sehingga proses pembuatan konten menjadi terhambat. Kebermanfaatan penggunaan Instagram

sebagai media komunikasi dan informasi berbasis elektronik dapat terlaksana apabila unsur pelaksana didalamnya telah tersedia dan memadai. Oleh karena itu, kurangnya infrastruktur teknologi pembuatan konten informasi di DPPPA membuat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan DPPPA dalam menggunakan Instagram sebagai media *e-government*.

Riset ini akan berkontribusi dalam perdebatan ilmiah tentang penggunaan medsos di sektor publik dengan kesiapan lembaga pemerintah yang melaksanakannya. Sebelumnya, riset terkait kesiapan dalam pelaksanaan *e-government* lebih banyak mengangkat tema mengenai beberapa sistem informasi yang dikembangkan pemerintah, penggunaan Instagram sebagai media *e-government* merupakan hal yang relatif baru dan masih minim dijadikan topik kajian pada penelitian sebelumnya. Selain kebaruan topik penelitian, peneliti juga berupaya mengisi kekosongan riset yang berfokus pada analisa kesiapan dalam menggunakan media sosial dari perspektif lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Menggunakan Instagram Sebagai Media *E-government*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menggunakan Instagram Sebagai Media *E-government*?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menggunakan Instagram sebagai media *e-government*. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah, khususnya bagi DPPPA Prov Sumsel untuk mempersiapkan lembaganya dalam menggunakan teknologi atau media baru yang kemungkinan akan terus berubah dan bermunculan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. APITKOM.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.

Internet :

Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 12. <https://doi.org/10.31947/jgov.v8i2.110> (Diakses 5 November 2022, Pukul 18.20 WIB)

Al-Omari, A., & Al-Omari, H. (2006). *E-Government Readiness Assessment Model*. *Journal of Computer Science*, 2(11), 841–845. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2006.841.845> (Diakses 19 November 2022, Pukul 08.02 WIB)

Amali, S. (2016). Kesiapan PPID Dinas Komunikasi Informatika Dalam Pelayanan Informasi Publik (Kasus di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 20(2), 123–140. <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.20.2.685> (Diakses 22 September 2022, Pukul 19.14 WIB)

Amran, L. N. H. & Yuliana. (2021). Kesiapan Sumber Daya Aparat PSC (Public Safety Center) 119 Takalar dalam Pengimplementasian *E-government* untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif. *Jurnal Pena*, 8(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/6700> (Diakses 23 September 2022, Pukul 08.46 WIB)

Aprilia, S. (2020). *Tantangan Penerapan E-government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*. Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185672> (Diakses 18 Desember 2022, Pukul 21.44 WIB)

Arianto, B. (2022). Melacak Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13(1), 113. <https://doi.org/10.31506/jrk.v13i1.15788> (Diakses 7 Desember 2022, Pukul 13.30 WIB)

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPM. (Diakses 19 November 2022, Pukul 21.30 WIB)
- Azlina, N., Naza, A., & Julita, J. (2020). *Factors influencing readiness of local governments in implementing government regulation in government of Riau province*. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss1.art2> (Diakses 8 November 2022, Pukul 10.14 WIB)
- Brogan, C. (2010). *Social media 101: Tactics and tips to develop your business online*. Wiley. (Diakses 24 Oktober 2022, Pukul 18.11 WIB)
- Byrd, T. A., & Turner, D. E. (2000). *Measuring the Flexibility of Information Technology Infrastructure: Exploratory Analysis of a Construct*. *Journal of Management Information Systems*, 17(1), 167–208. <https://doi.org/10.1080/07421222.2000.11045632> (Diakses 20 November 2022, Pukul 08.20 WIB)
- Cahyono, A. S. (2016). *Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia* (pp. 140–157) [Preprint]. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wxvpq> (Diakses 24 Oktober 2022, Pukul 18.45 WIB)
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). *Social Media: Defining, Developing, and Divining*. *Atlantic Journal of Communication*, 23(1), 46–65. <https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282> (Diakses 24 Oktober, Pukul 18.43 WIB)
- Christensen, R. K., & Gazley, B. (2008). *Capacity for public administration: Analysis of meaning and measurement*. *Public Administration and Development*, 28(4), 265–279. <https://doi.org/10.1002/pad.500> (Diakses 5 November 2022, Pukul 21.30 WIB)
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). *E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151. <https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210202> (Diakses 4 November 2022, Pukul 11.57 WIB)
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). *Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(2), 184–195. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220207> (Diakses 23 September 2022, Pukul 09.41 WIB)

- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1996). *Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia* (Cet. 1). RajaGrafindo Persada. (Diakses 18 November 2022, Pukul 12.29 WIB)
- Dharmanegara, I. B. A. (2019). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Universitas Warmadewa Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Perguruan Tinggi di Masa Depan. *WICAKSANA : Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 3(2), 61–70. (Diakses 20 November 2022, Pukul 20.57 WIB)
- Dihni, V. A. (2022, May 9). Warga RI Main Medsos 3 Jam per Hari, Ini Peringkat Globalnya. *Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://bit.ly/43dBD6o> (Diakses 4 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB)
- Eisinger, P. (2002). *Organizational Capacity and Organizational Effectiveness among Street-Level Food Assistance Programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 31(1), 115–130. <https://doi.org/10.1177/0899764002311005> (Diakses 5 November 2022, Pukul 20.30 WIB)
- Fauzy, A. (2015). *Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012*. 2(2), 13.
- Georgenia, M. P., Damasemil, C., Gelgel, Ni Made Ras Amanda, & Pradipta Ade Devia. (2022). Motif dan Kepuasan Anak Muda Kota Denpasar Dalam Penggunaan Fitur Reels Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 9. (Diakses 24 Oktober 2022, Pukul 07.56 WIB)
- Goodstats. (2022, June 21). Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022. *Goodstats.Id*. <https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022-JpfD1> (Diakses 8 November 2022, Pukul 08.34 WIB)
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintah dan Potensi Desa Berbasis Web*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1). (Diakses 23 September 2022, Pukul 09.53 WIB)
- Hastrida, A. (2021). *Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Resiko*. 25(2), 17. (Diakses 9 Oktober 2022, Pukul 18.29 WIB)
- Horton, D., *International Service for National Agricultural Research, International Development Research Centre (Canada), & Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (Ede, Netherlands)* (Eds.). (2003). *Evaluating capacity development: Experiences from research and development organizations around the world*. ISNAR; International Development Research Centre; ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation. (Diakses 11 November 2022, Pukul 21.21 WIB)
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Publica Press.

- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>(Diakses 24 Oktober 2022, Pukul 11.32 WIB)
- Khairinal, K., Syuhadah, S., & Aminah, S. (2022). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua, Potensi Diri, dan Dukungan Teman Sebaya Terhadap Keputusan Siswa memilih Universitas Jambi. 3(2), 9. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2> (Diakses 6 November 2022, Pukul 13.27 WIB)
- Khan, G. F. (2017). *Social Media for Government*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2942-4>(Diakses 19 Oktober 2022, 11.43 WIB)
- Kurnia, N. D., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan ITENAS. *EduLib*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17509/edulib.v8i1.10208> (Diakses 24 Oktober 2022, Pukul 19.15 WIB)
- Lavenia, A. (2021, November 8). Media Sosial dalam *E-Government*: Partisipasi atau Manipulasi? *Remotivi.or.Id*. <https://www.remotivi.or.id/mediapedia/724/media-sosial-dalam-e-government-partisipasi-atau-manipulasi> (Diakses 8 November 2022, Pukul 10.57 WIB)
- Maher, L. P. (2018). *Learning Political Will In Organizations: A Social Learning Theory Perspective*. http://purl.flvc.org/fsu/fd/2018_Sp_Maher_fsu_0071E_14422 (Diakses 5 November 2022, Pukul 21.04 WIB)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd edition). Sage Publication.
- Murjani. (2021). Hakikat dan Sistem Nilai Dalam Konteks Teknologi Pendidikan. *ADIBA : Journal Of Education*, 1(1), 107–119. (Diakses 18 November 2022, Pukul 08.12 WIB)
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). *Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions*. *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference on Digital Government Innovation in Challenging Times - Dg.o '11*, 282–291. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037602> (Diakses 22 September 2022, Pukul 18.46 WIB)
- Nugraha, J. T. (2018). *E-government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.

<http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758> (Diakses 23 September 2022, Pukul 08.12 WIB)

- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. AURA PUBLISHER.
- Payong, Y. (2019). Kesiapan Implementasi *E-Government* Menuju Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.37182/jik.v4i1.27> (Diakses 8 November 2022, Pukul 08.49 WIB)
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). *Defining Political Will: Post et al. / DEFINING POLITICAL WILL. Politics & Policy*, 38(4), 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x> (Diakses 6 November 2022, Pukul 21.50 WIB)
- Putri, N. A. D., & Darmawan, E. (2018). *E-readiness* Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penerapan *E-government* (Studi Terhadap Kepri *Smart Province*). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(01). <https://www.neliti.com/id/publications/271482/e-readiness-provinsi-kepulauan-riau-dalam-penerapan-e-government-studi-terhadap> (Diakses 22 September 2022, Pukul 18.45 WIB)
- Randang, D. M., Djani, W., & Rani, L. S. (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam Penerapan *e-government*. *JAD (Jurnal Administrasi dan Demokrasi)*, 1(1), 9. (Diakses 8 November 2022, Pukul 08.52 WIB)
- Runtu, A. C., Mandey, J., & Ogotan, M. (2015). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan Pada Bagian Akademik Universitas Sam Ratulangi Manado. 2(30), 13. (Diakses 20 November, Pukul 14.23 WIB)
- Sah, S., & suhartono, suhartono. (2018). Kesiapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Dalam Mendukung Implementasi *Smart City* di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.32477/jrm.v5i1.39> (Diakses 22 September 2022, Pukul 18.59 WIB)
- Sani, A., & Wiliani, N. (2019). Faktor Kesiapan Adopsi Teknologi Informasi dalam Konteks Teknologi Serta Lingkungan Pada UMKM di Jakarta. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.33480/jitk.v5i1.616> (Diakses 8 November 2022, Pukul 09.00 WIB)
- Solvía, G. (2018). *Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar Pemrograman Dasar di SMK Muhammadiyah Bukittinggi* [Skripsi].

- Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2018). Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan *E-government*. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, 2(1). <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.981> (Diakses 22 Oktober 2022, Pukul 18.46 WIB)
- Tamma, R. A., & Utomo, I. H. (2021). Kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Mewujudkan *Klaten Smart City*. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.66> (Diakses 22 September 2022, Pukul 18.45 WIB)
- Turban, E., R. Kelly, R., & Richard, E. P. (2005). *Introduction to information technology* (3rd Edition). John Wiley & Sons.
- Untari, F. (2018). *Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-TAX) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)*. (Diakses 4 November 2022, Pukul 13.25 WIB)
- We are social & Hootsuite. (2022, February 15). Digital 2022: Indonesia. *Datareportal.Com*. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> (Diakses 10 November 2022, Pukul 11.45 WIB)
- Wirajaya, M. K. M., & Dewi, N. M. U. K. (2020). Analisis Kesiapan Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Menerapkan Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.53017> (Diakses 8 November 2022, Pukul 09.32 WIB)
- Yamin, M. (2018). Analisis *Open Government* dan *e-Government* di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja *Sustainable Development Goals*: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72137> (Diakses 16 Desember 2022, Pukul 12.59 WIB)
- Yu-Lee, R. T. (2002). *Essentials of capacity management*. Wiley.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah